

# OPTIMALISASI TATA KELOLA TEMPAT PELELANGAN IKAN ARUMBAI DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

ADHYAKSA LOKWATTY

32.0988

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : 32.0988 @praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dedi Kusmana, S.Sos., M.Si.

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** Arumbai Fish Auction Place (TPI) as one of the marketing centers for fishermen's catches has a strategic role in supporting the growth of the local fisheries economy. However, the management of Arumbai TPI still faces various problems such as inadequate facilities, an auction process that is not in accordance with regulations, many transactions outside the TPI, and weak supervision that results in leakage of regional income. **Purpose :** This study aims to analyze the optimization of the governance of Arumbai TPI in Ambon City. **Method:** The approach used is qualitative with a constructivism paradigm. Data collection techniques are carried out through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants in this study include TPI managers, fishermen, and related local government officials. **Results :** The results of the study indicate that the governance of Arumbai TPI is not optimal and still faces a number of obstacles, such as inadequate infrastructure and facilities, suboptimal regulations, lack of coordination between parties, a culture of transactions outside the official auction system, limited human resources, and budget constraints. **Conclusion:** To optimize the management of Arumbai TPI, it is necessary to strengthen regulations that are implemented consistently, improve infrastructure and facilities, improve the supervision system, and encourage sustainable cross-sector collaboration. Thus, Arumbai TPI can play a maximum role in improving the welfare of fishermen and Regional Original Income (PAD).

**Keywords:** Fish Auction Place, Governance, Optimization.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Arumbai sebagai salah satu pusat pemasaran hasil tangkapan nelayan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perikanan lokal. Namun, pengelolaan TPI Arumbai masih menghadapi berbagai permasalahan seperti fasilitas yang belum memadai, proses pelelangan yang tidak sesuai regulasi, masih banyaknya transaksi di luar TPI, serta lemahnya pengawasan yang mengakibatkan kebocoran pendapatan daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi tata kelola TPI Arumbai di Kota Ambon. **Metode:** Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi pengelola TPI, nelayan, serta aparatur pemerintah daerah yang terkait. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola TPI Arumbai belum optimal dan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti infrastruktur dan fasilitas

yang tidak memadai, regulasi yang belum optimal, kurangnya koordinasi antar pihak, budaya transaksi di luar sistem lelang resmi, keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala anggaran. **Kesimpulan:** Untuk mengoptimalkan pengelolaan TPI Arumbai, perlu dilakukan penguatan regulasi yang diimplementasikan secara konsisten, peningkatan infrastruktur dan fasilitas, pembenahan sistem pengawasan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Dengan demikian, TPI Arumbai dapat berperan maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Kata Kunci:** Tempat Pelelangan Ikan, Tata Kelola, Optimalisasi.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi kepulauan di kawasan timur Indonesia yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, luas wilayah laut Maluku mencapai 92,4% dari total luas wilayah provinsi. Potensi sumber daya ikan Maluku tersebar di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu WPP 714 (Laut Banda), WPP 715 (Laut Seram dan Teluk Tomini), serta WPP 718 (Laut Arafura dan Laut Timor), yang secara keseluruhan menyumbang potensi produksi sebesar 4,66 juta ton, dengan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebesar 3,73 juta ton. Ketiga WPP ini menyumbang sekitar 30% dari total potensi sumber daya ikan nasional (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019).

Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku berperan sebagai pusat administrasi pemerintahan dan pusat perekonomian. Terletak di Pulau Ambon, kota ini memiliki luas perairan yang lebih besar dibandingkan daratan, dengan garis pantai sepanjang 98 km serta Teluk Ambon yang kaya sumber daya laut. Kondisi geografis ini menjadikan Kota Ambon sebagai salah satu pusat kegiatan perikanan yang strategis.

Berdasarkan data Dinas Perikanan Kota Ambon, produksi perikanan tangkap menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, produksi kembali meningkat secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya, yang juga diiringi dengan kenaikan nilai produksi. Peningkatan ini menunjukkan adanya potensi besar dalam sektor perikanan yang dapat dioptimalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola dengan baik.

Salah satu instrumen penting dalam mendukung pemasaran hasil tangkapan nelayan adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, TPI berfungsi sebagai sarana pemasaran ikan melalui mekanisme lelang. Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. TPI tidak hanya sebagai tempat jual beli ikan, tetapi juga berfungsi sebagai pusat data harga ikan, pembinaan mutu, serta peningkatan pendapatan nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya.

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2007, TPI harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti lantai kedap air, sistem pembuangan limbah cair yang higienis, fasilitas sanitasi, fasilitas rantai dingin, dan area khusus untuk produk yang tidak layak konsumsi. Sementara itu, Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 53 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pemerintah daerah

bertanggung jawab atas penyediaan dan pengelolaan TPI, serta menetapkan retribusi sebesar 3,5% dari nilai transaksi penjualan ikan.

TPI Arumbai, yang terletak di kawasan pesisir Kota Ambon, merupakan TPI terbesar dan paling strategis. Namun, meskipun memiliki peran penting dalam distribusi hasil tangkapan dari berbagai kecamatan di Kota Ambon dan sekitarnya, pengelolaan TPI Arumbai masih menghadapi berbagai permasalahan krusial.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Ambon 2023–2026, salah satu isu utama adalah belum optimalnya tata kelola TPI. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi meliputi:

1. Fasilitas fisik yang tidak memadai, seperti ketiadaan coolbox untuk menjaga mutu ikan, sempitnya area pelelangan akibat keberadaan pedagang yang tidak tertata, serta kondisi kebersihan dan sirkulasi yang buruk.
2. Ketidaksiuaian pelaksanaan dengan regulasi, terutama dalam hal mekanisme penimbangan. Peraturan Walikota mengharuskan penimbangan ikan sebelum dilelang, namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa ikan dijual berdasarkan satuan "loyang", yang rentan menimbulkan ketidakadilan harga dan pelaporan yang tidak akurat.
3. Maraknya transaksi di luar TPI, di mana nelayan lebih memilih menjual hasil tangkapannya langsung kepada pedagang pengumpul dengan harga yang lebih tinggi daripada di TPI, meskipun hal ini bertentangan dengan kebijakan yang berlaku. Praktik ini memperpanjang rantai distribusi dan menyebabkan tingginya harga ikan di tingkat konsumen.
4. Kurangnya pengawasan dan pencatatan transaksi, yang mengakibatkan hilangnya potensi retribusi serta lemahnya akuntabilitas pengelolaan.
5. Minimnya partisipasi nelayan dalam pengambilan keputusan dan ketimpangan kekuasaan dalam mekanisme lelang, yang seringkali lebih menguntungkan pihak tertentu, seperti juru lelang atau tengkulak.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan adanya kompleksitas dalam implementasi kebijakan pengelolaan TPI, yang berdampak pada efisiensi operasional, kesejahteraan nelayan, serta pendapatan daerah. Dalam konteks ini, TPI tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan penguatan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki tata kelola TPI Arumbai menjadi penting dan mendesak. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan TPI, baik dari aspek kelembagaan, infrastruktur, maupun partisipasi pemangku kepentingan, menjadi langkah awal menuju pengelolaan perikanan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

## **1.2 Gap Penelitian**

Gap penelitian terkait pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kota Ambon, khususnya di TPI Arumbai, dapat dilihat dari beberapa aspek penting yang masih belum optimal. Pertama, terdapat masalah dalam pengelolaan infrastruktur TPI yang belum memadai, seperti ketiadaan coolbox, area pelelangan yang sempit, serta kondisi kebersihan yang buruk, yang berdampak pada kualitas ikan dan efisiensi

operasional. Kedua, ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan, terutama terkait mekanisme penimbangan ikan, yang seharusnya dilakukan sebelum pelelangan tetapi pada kenyataannya ikan dijual berdasarkan satuan "loyang," menyebabkan ketidakadilan harga dan laporan transaksi yang tidak akurat. Selain itu, maraknya transaksi di luar TPI, di mana nelayan lebih memilih menjual hasil tangkapan langsung kepada pedagang pengumpul dengan harga yang lebih tinggi, juga menambah panjang rantai distribusi dan mempengaruhi harga ikan di pasar. Kurangnya pengawasan dan pencatatan transaksi menyebabkan hilangnya potensi retribusi dan rendahnya akuntabilitas pengelolaan TPI, sementara minimnya partisipasi nelayan dalam pengambilan keputusan serta ketimpangan kekuasaan dalam mekanisme lelang cenderung menguntungkan pihak tertentu, seperti juru lelang atau tengkulak. Terakhir, terdapat gap dalam evaluasi kelembagaan TPI dan sinergi antara pemerintah daerah, nelayan, pedagang, dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian yang mendalam dalam area ini dapat memberikan wawasan penting untuk meningkatkan pengelolaan TPI, efisiensi pasar perikanan, serta kesejahteraan nelayan dan pendapatan asli daerah.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengkaji pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan optimalisasi operasional TPI di berbagai wilayah. Penelitian Buton (2023) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kota Ambon" mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan TPI di Kota Ambon belum optimal karena adanya kepentingan pribadi, kurangnya fasilitas pendukung, serta pengawasan yang kurang efektif. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena fokusnya yang serupa pada pengelolaan TPI di Kota Ambon, meskipun berbeda dalam hal penekanan aspek, di mana penelitian ini lebih menekankan pada optimalisasi tata kelola secara menyeluruh. Penelitian Sugoro (2024) mengenai desain TPI di Merauke mengkaji aspek teknis dan infrastruktur TPI dengan menggunakan pendekatan arsitektur postmodern. Temuan utamanya adalah pentingnya perencanaan fasilitas yang terintegrasi dan memperhatikan fungsi serta estetika. Penelitian ini relevan dalam hal standar fasilitas yang diperlukan untuk operasional TPI, meskipun berbeda dengan penelitian yang lebih fokus pada tata kelola dan manajemen operasional.

Penelitian lainnya oleh Isma (2022) mengenai efektivitas dan strategi pengembangan TPI di Bungku, Sulawesi Tengah, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan TPI dalam mendukung nelayan, serta menawarkan strategi pengembangan fisik dan pelayanan. Meskipun relevan dalam konteks pengelolaan TPI, penelitian ini lebih mengutamakan aspek efektivitas operasional dan pengembangan fisik dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan, yang lebih fokus pada tata kelola berdasarkan regulasi yang berlaku. Penelitian Dewianti (2023) tentang pengawasan pengelolaan TPI Arumbai di Kota Ambon menyebutkan bahwa pengawasan yang belum optimal merupakan hambatan utama dalam efektivitas TPI, yang juga berkaitan dengan penelitian ini yang akan mengeksplorasi aspek pengawasan dan tata kelola.

Sinaga (2020) melakukan studi kasus tentang pengelolaan TPI di Dumai yang menunjukkan bahwa TPI di sana belum menjalankan fungsinya secara optimal

sebagai tempat pelelangan, dengan pengorganisasian yang masih terbatas. Hal ini mirip dengan permasalahan yang dihadapi TPI Arumbai. Penelitian lain oleh Wiraditama et al. (2024) tentang mutu ikan tongkol di TPI Gudang Lelang menunjukkan penurunan kualitas ikan, yang juga terkait dengan pentingnya pengelolaan yang lebih baik agar kualitas ikan tetap terjaga. Selain itu, penelitian Karimah et al. (2019) yang menganalisis efisiensi TPI di Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa TPI di daerah tersebut belum memenuhi persyaratan teknis efisiensi, yang dapat menjadi referensi untuk meningkatkan efisiensi operasional TPI Arumbai. Terakhir, Asraruddin & Patiung (2023) dalam analisis margin pemasaran dan Fisherman Share di TPI Karangantu menunjukkan adanya ketimpangan dalam rantai pemasaran ikan yang mempengaruhi kesejahteraan nelayan. Penelitian ini relevan dalam konteks analisis pemasaran dan distribusi hasil tangkapan nelayan yang juga perlu diperhatikan dalam pengelolaan TPI di Kota Ambon.

Penelitian oleh Dawa et al. (2024) memberikan informasi penting untuk pemahaman lebih lanjut mengenai prevalensi dan tingkat infeksi parasit *Anisakis* sp. pada ikan tongkol, yang dapat berkontribusi pada upaya pengelolaan kesehatan ikan di wilayah tersebut. Penelitian ini sangat relevan dengan pengelolaan TPI karena memperlihatkan pentingnya kontrol kualitas ikan terkait kesehatan produk yang dipasarkan.

Penelitian Balqis et al. (2019) memberikan solusi berupa digitalisasi proses pelelangan ikan, yang diharapkan dapat memperbaiki sistem pelelangan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia. Solusi digitalisasi ini memiliki relevansi tinggi dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi di TPI yang dapat diterapkan pada sistem operasional TPI di berbagai daerah, termasuk TPI di Kota Ambon.

Wati, S. M., & Hafiludin (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas ikan kurisi dan swanggi yang dipasarkan di TPI Mayangan dapat diterima oleh konsumen dan memenuhi standar kualitas yang diperlukan. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang pentingnya menjaga kualitas ikan dalam operasional TPI, yang dapat dijadikan referensi untuk pengelolaan kualitas ikan di TPI Arumbai.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian tentang Optimalisasi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Arumbai di Kota Ambon memiliki kebaruan ilmiah yang signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Salah satu perbedaan utamanya terletak pada pendekatannya yang lebih komprehensif, dengan fokus tidak hanya pada implementasi kebijakan atau infrastruktur TPI, tetapi juga pada optimalisasi tata kelola secara menyeluruh, yang mencakup manajemen operasional, pengawasan, mekanisme lelang, serta partisipasi nelayan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini mengkaji lebih dalam dampak dari peraturan lokal seperti Peraturan Walikota Ambon terhadap pengelolaan TPI, serta bagaimana ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan. Hal ini berbeda dengan penelitian Buton (2023) yang lebih fokus pada implementasi kebijakan dan penelitian Dewianti (2023) yang hanya menekankan pada aspek pengawasan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi pentingnya partisipasi aktif nelayan dalam mekanisme lelang yang lebih adil, yang belum banyak dikaji sebelumnya. Penelitian ini juga memberikan perhatian khusus

pada pengawasan dan pencatatan transaksi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional, yang selama ini menjadi tantangan dalam pengelolaan TPI. Selain itu, penelitian ini mengusulkan perbaikan infrastruktur seperti fasilitas coolbox, area pelelangan, dan sistem sanitasi yang mendukung kualitas ikan dan proses lelang yang lebih efisien, berbeda dengan penelitian Sugoro (2024) yang lebih fokus pada aspek desain fisik. Terakhir, penelitian ini juga berupaya menyelaraskan TPI dengan kebijakan ekonomi daerah untuk meningkatkan kontribusi TPI terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi aspek penting yang belum banyak dikaji pada penelitian sebelumnya. Dengan pendekatan yang lebih holistik ini, penelitian ini menawarkan strategi praktis untuk mengatasi permasalahan yang ada, serta rekomendasi yang lebih aplikatif untuk pengelolaan TPI Arumbai yang lebih efektif dan berkelanjutan.

### **1.5 Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis optimalisasi tata kelola TPI Arumbai di Kota Ambon, mengidentifikasi penghambat dalam pengelolaannya, serta menganalisis upaya Pemerintah Kota Ambon dalam mengoptimalkan pengelolaan TPI, termasuk kebijakan dan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan nelayan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme sebagaimana yang dijelaskan oleh Creswell (2020), yang memandang bahwa realitas sosial merupakan hasil konstruksi atau bentuk dari manusia itu sendiri. Realitas sosial ini bersifat subjektif dan beragam, tergantung pada pengalaman individu. Dalam penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau paradigma interpretif, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel (Ridwan & Tungka, 2024). Dalam konteks penelitian ini, paradigma konstruktivisme diterapkan untuk menganalisis bagaimana pemangku kepentingan seperti pengelola TPI, nelayan, pedagang, dan petugas membangun pemahaman mereka tentang tata kelola TPI Arumbai. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara deskriptif situasi yang ada di lapangan, dengan metode yang berfokus pada pencarian makna dan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti (Simangunsong, 2017). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali data secara lebih komprehensif, kredibel, dan bermakna. Sebagai kerangka teoretis, penelitian ini mengacu pada teori optimalisasi oleh Siringoringo (2005), yang mengidentifikasi tiga dimensi utama yang mempengaruhi optimalisasi tata kelola, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi.

Pemilihan pendekatan kualitatif ini didasarkan pada sifat penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses sosial dan interaksi yang terjadi di TPI Arumbai. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif individu terkait tata kelola dan pengelolaan TPI, yang sulit diukur hanya melalui data kuantitatif. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipilih karena lebih mampu menggali nuansa dan makna dalam konteks sosial yang kompleks (Creswell, 2020). Dalam penelitian ini, paradigma konstruktivisme menjadi pilihan yang tepat karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana para pemangku kepentingan membangun realitas

sosial mereka tentang tata kelola TPI, yang sangat bergantung pada pengalaman dan pandangan mereka masing-masing.

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, yang sesuai dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari tiga sumber utama yaitu person, place, dan paper (Arikunto, 2013). Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber atau informan yang memiliki pengetahuan mendalam terkait masalah yang diteliti. Pendekatan ini umumnya lebih sesuai dan efisien dalam situasi di mana jumlah responden relatif terbatas (Nurdin & Hartati, 2019:179), sementara observasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman lebih jelas mengenai proses yang terjadi di lapangan (Simangunsong, 2017). Dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi, seperti arsip atau laporan yang relevan.

Alasan menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh data yang holistik dan mendalam, yang tidak hanya dapat diperoleh dari satu sumber saja, tetapi juga melalui berbagai perspektif yang saling melengkapi. Wawancara mendalam memberikan kesempatan untuk menggali pandangan dan pengalaman pribadi informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan TPI, sementara observasi memberi gambaran langsung mengenai bagaimana interaksi dan proses pengelolaan berlangsung. Dokumentasi memberikan bukti tambahan yang relevan dengan fenomena yang diteliti, sehingga memungkinkan peneliti untuk memverifikasi dan memperkaya data yang terkumpul.

Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling dan Snowball Sampling, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Sugiyono (2018), untuk memastikan bahwa informan yang terpilih adalah mereka yang paling mengetahui dan relevan dengan topik penelitian. Teknik Purposive Sampling dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang memiliki pengetahuan mendalam dan relevansi terhadap topik penelitian. Teknik Snowball Sampling digunakan karena dalam penelitian sosial, terkadang sulit untuk menemukan informan yang relevan secara langsung, dan pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menemukan informan melalui referensi dari informan sebelumnya, sehingga jaringan informasi yang diperoleh semakin kaya dan bervariasi.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah pengelola TPI Arumbai, nelayan utama, serta pedagang ikan yang terlibat langsung dalam operasional TPI. Pengelola TPI dianggap sebagai informan kunci karena mereka memiliki wawasan tentang kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam pengelolaan TPI, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan operasional TPI. Nelayan utama menjadi informan kunci karena mereka adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan dan pelelangan, serta menjadi pihak yang paling terdampak oleh kebijakan pengelolaan TPI. Pedagang ikan juga menjadi informan kunci karena mereka memainkan peran penting dalam proses distribusi hasil tangkapan dan menentukan dinamika pasar di TPI.

Proses pengumpulan data dilakukan secara berkelanjutan hingga tercapai saturasi data (Creswell, 2020), yaitu kondisi di mana peneliti merasa bahwa data yang terkumpul sudah cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian dan tidak ada informasi baru yang signifikan. Hasil data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai dengan prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif yang dijelaskan oleh Simangunsong (2017). Penelitian dilaksanakan di Dinas Perikanan Kota Ambon dan Tempat Pelelangan Ikan Arumbai yang dilakukan selama 3 minggu.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Optimalisasi tata kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Arumbai di Kota Ambon merupakan proses strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasional TPI. Melalui pendekatan analisis berdasarkan teori Siringoringo (2005), optimalisasi ini mencakup tiga dimensi utama: tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi. Setiap dimensi dibahas berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam operasionalisasi konsep.

#### **3.1 Optimalisasi Tata Kelola TPI Arumbai dari Dimensi Tujuan**

Optimalisasi tata kelola TPI Arumbai ditinjau dari dimensi tujuan difokuskan pada sejauh mana pengelolaan TPI mampu mewujudkan sistem pelelangan ikan yang efisien, adil, dan transparan, serta berdampak positif terhadap kesejahteraan nelayan dan ekosistem ekonomi perikanan lokal. Penelitian ini menilai keberhasilan dimensi tujuan melalui dua indikator utama, yaitu peningkatan layanan pelelangan dan minimalisasi kendala operasional. Dari hasil wawancara dan observasi, layanan pelelangan di TPI Arumbai menunjukkan adanya peningkatan, baik dari segi volume produksi maupun retribusi yang dikumpulkan. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam efisiensi transaksi dan ketersediaan ikan berkualitas yang menjadi daya tarik bagi nelayan dan pedagang untuk terus menggunakan fasilitas TPI.

Namun, peningkatan ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat sejumlah kendala. Faktor eksternal seperti cuaca buruk dan keterbatasan armada penangkapan ikan mempengaruhi pasokan dan harga ikan. Selain itu, mekanisme lelang yang diterapkan saat ini yakni sistem lelang turun seringkali tidak menguntungkan nelayan dan memberi ruang besar bagi juru lelang untuk mendominasi penetapan harga. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan kekuatan antara penjual dan pembeli, yang berpotensi mengurangi transparansi serta keadilan dalam proses pelelangan.

Di sisi lain, minimalisasi kendala operasional masih menjadi tantangan serius dalam optimalisasi TPI Arumbai. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi masih banyaknya transaksi di luar TPI, keterbatasan ruang pelelangan, buruknya sanitasi, kurangnya fasilitas pendukung seperti sistem pendingin, serta minimnya jumlah petugas pengawas. Selain itu, belum konsistennya penerapan regulasi pelelangan juga memperburuk kondisi. Faktor ekonomi menjadi alasan utama nelayan dan pedagang memilih bertransaksi di luar TPI, karena ingin menghindari kerugian akibat fluktuasi harga, biaya tambahan seperti transportasi dan pikol, serta kenyamanan ruang transaksi.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam layanan pelelangan, pencapaian tujuan optimalisasi tata kelola TPI

Arumbai masih terhambat oleh berbagai kendala struktural dan sistemik. Kendala-kendala tersebut mendorong perilaku menyimpang dari sistem resmi, sehingga mengurangi efektivitas TPI sebagai pusat transaksi perikanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi untuk mengembangkan solusi komprehensif dalam mengatasi hambatan-hambatan ini agar tujuan optimalisasi dapat benar-benar tercapai.

### **3.2 Optimalisasi Tata Kelola TPI Arumbai dari Dimensi Alternatif Keputusan**

Dalam kerangka teori optimalisasi yang dikemukakan oleh Siringoringo (2005), dimensi alternatif keputusan memegang peran strategis dalam mencapai tujuan kelembagaan secara efektif dan efisien. Dimensi ini menekankan pentingnya identifikasi serta penerapan berbagai pilihan kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan, memanfaatkan peluang, dan mengoptimalkan proses serta output kelembagaan. Dalam konteks pengelolaan TPI Arumbai, dimensi alternatif keputusan mencakup empat indikator utama yang dianalisis secara mendalam, yaitu penerapan regulasi, pelaksanaan sistem pelelangan, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan pengawasan terhadap aktivitas TPI. Keempat aspek ini menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana strategi dan kebijakan yang diterapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, transparansi proses, serta akuntabilitas dalam tata kelola TPI Arumbai.

#### **1. Penerapan Regulasi**

Penerapan regulasi merupakan indikator penting dalam dimensi alternatif keputusan, yang dalam konteks TPI Arumbai merujuk pada Peraturan Walikota Ambon Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Regulasi ini telah memberikan kerangka hukum yang jelas mencakup struktur organisasi, mekanisme pelelangan, dan sistem retribusi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, terutama rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan dan belum diterapkannya sanksi yang tegas bagi pelanggaran. Meskipun sosialisasi telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan—termasuk juru lelang, nelayan, dan pedagang dan mereka mengaku mengetahui regulasi tersebut, tingkat kepatuhan masih rendah.

Pemerintah, melalui Dinas Perikanan Kota Ambon, memilih pendekatan humanis dalam menerapkan regulasi, dengan mempertimbangkan kondisi sosial Kota Ambon yang rawan konflik. Pendekatan ini menekankan pada dialog, pembangunan kepercayaan, dan keamanan sosial sebagai prasyarat keberhasilan kebijakan. Sementara itu, Kepala TPI mengidentifikasi adanya partisipasi masyarakat dalam aktivitas pelelangan, namun menyoroti ketiadaan sanksi sebagai hambatan utama dalam menciptakan kepatuhan yang efektif. Dengan demikian, penerapan regulasi di TPI Arumbai saat ini berada dalam tahap transisi, yang membutuhkan keseimbangan antara pendekatan humanis dan penegakan hukum yang konsisten untuk mencapai optimalisasi tata kelola secara menyeluruh.

#### **2. Pelaksanaan Sistem Pelelangan**

Pelaksanaan sistem pelelangan di TPI Arumbai menunjukkan praktik yang berbeda dari pelelangan konvensional. Meskipun secara formal diatur melalui SOP

dan Perda No. 1 Tahun 2024, implementasi di lapangan lebih menyerupai transaksi jual beli melalui perantara, yakni juru lelang. Proses pelelangan melibatkan pemungutan retribusi oleh petugas TPI dari pemilik dan pembeli ikan, namun peran juru lelang cenderung sebagai perantara yang memiliki hubungan patron-klien dengan nelayan, bahkan memberikan modal untuk armada penangkapan. Sistem ini mempermudah transaksi dan menciptakan stabilitas pasokan, tetapi mengorbankan transparansi harga karena juru lelang memiliki posisi dominan. Praktik lokal seperti penggunaan loyang sebagai satuan ukur menggantikan penimbangan formal demi efisiensi, meskipun mengurangi akurasi. Selain itu, lelang dilakukan dengan sistem harga turun, bukan naik seperti dalam mekanisme lelang formal. Data pelelangan selama 2024 mencatat rata-rata 25 kali pelelangan per bulan dengan rata-rata volume 5,7 ton per pelelangan, menunjukkan stabilitas aktivitas namun juga memperkuat bahwa sistem yang berlaku lebih berbasis pada kebiasaan lokal dan hubungan sosial-ekonomi daripada ketentuan formal yang ideal.

### **3. Koordinasi**

Koordinasi antar pemangku kepentingan di TPI Arumbai telah berjalan melalui pertemuan rutin dan komunikasi langsung antara Dinas Perikanan, pengelola TPI, asosiasi nelayan, pedagang, serta instansi terkait. Meski demikian, efektivitas koordinasi ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam mengakomodasi kepentingan beragam pihak seperti nelayan, pedagang, konsumen, dan pemerintah daerah. Pengelola TPI melakukan koordinasi harian dengan petugas dan juru lelang terkait pendataan dan pelaporan produksi, sementara juru lelang berperan sebagai penghubung antara nelayan dan pedagang. Namun, masih terdapat kesenjangan komunikasi, khususnya antara juru lelang dan nelayan, yang sering tidak menginformasikan kedatangan mereka, sehingga menyebabkan oversupply dan penurunan harga ikan. Meskipun nelayan mengaku berkoordinasi dengan juru lelang, ketidakteraturan komunikasi menunjukkan perlunya mekanisme koordinasi yang lebih sistematis. Berdasarkan data intensitas hubungan, koordinasi paling tinggi terjadi antara Dinas Perikanan dan pengelola TPI serta antara nelayan dan pedagang, namun hubungan antara pengelola TPI dengan masyarakat dan Dinas Perdagangan masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi preventif dan pengembangan sistem informasi pasokan-permintaan secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih responsif dan akurat.

### **4. Pengawasan**

Pengawasan terhadap aktivitas TPI Arumbai dilakukan secara berjenjang oleh Dinas Perikanan dan pengelola TPI, dengan pendekatan yang menekankan pencatatan transaksi sebagai bentuk kontrol formal untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pengawasan juga bersifat pembinaan, di mana petugas tidak hanya memantau, tetapi juga memberikan arahan kepada nelayan dan pedagang agar mematuhi prosedur yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan operasional yang kondusif dan minim konflik, sesuai karakter sosial Kota Ambon. Di sisi lain, staf TPI menggunakan metode informal berupa bantuan dari "mata-mata" untuk mengawasi kegiatan harian, yang meskipun efektif dalam menjangkau informasi tersembunyi, menimbulkan pertanyaan etis. Secara umum, pengawasan di TPI Arumbai telah mencakup aspek preventif dan partisipatif, namun masih lemah pada aspek korektif karena belum adanya mekanisme tindak lanjut yang

jelas terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, sistem pengawasan perlu diperkuat melalui prosedur standar yang tegas dan sistem evaluasi berkala agar dapat mendukung tercapainya pengelolaan TPI yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

### **3.3 Optimalisasi Tata Kelola TPI Arumbai dari Dimensi Sumber Daya yang Dibatasi**

#### **1. Sumberdaya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen penting dalam pengelolaan TPI Arumbai. Saat ini, TPI memiliki tiga pengelola dengan latar belakang sarjana perikanan yang menjalankan tugas pendataan, pemungutan retribusi, dan pelaporan secara terstruktur. Namun, jumlah personel ini masih dianggap kurang, terutama untuk fungsi pengawasan pelelangan dan administrasi, sehingga pengelolaan belum optimal. Salah satu kendala utama adalah masalah regenerasi, khususnya pada posisi juru lelang yang mayoritas berusia di atas 50 tahun dengan sedikit penerus yang siap menggantikan. Sistem regenerasi yang cenderung bersifat nepotisme dan minimnya pelatihan profesional membuat adaptasi terhadap sistem pelelangan modern menjadi sulit.

Data menunjukkan struktur personel didominasi oleh juru lelang berusia tua dengan masa kerja panjang, menandakan risiko keberlanjutan operasional TPI. Kesimpulannya, kendala utama dalam optimalisasi SDM di TPI Arumbai adalah keterbatasan jumlah personel, regenerasi yang kurang profesional, dan minimnya spesialisasi, sehingga diperlukan penambahan personel, sistem rekrutmen dan pelatihan yang lebih baik, serta peningkatan keahlian sesuai kebutuhan.

#### **2. Infrastruktur dan Fasilitas**

Infrastruktur dan fasilitas menjadi indikator penting dalam optimalisasi pengelolaan TPI Arumbai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa TPI Arumbai belum memenuhi standar nasional yang meliputi lantai kedap air, sistem pembuangan cair yang higienis, fasilitas sanitasi memadai, sistem pendingin, dan fasilitas penyimpanan yang cukup. Saat ini, fasilitas yang tersedia hanya kantor, timbangan, keranjang, dan WC, tanpa adanya cold storage atau sistem pendingin yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas ikan.

Kondisi fisik TPI juga belum ideal, dengan area pelelangan yang sempit karena menyatu dengan pasar dan kurangnya fasilitas penunjang. Hal ini menyulitkan akses bagi nelayan untuk membawa hasil tangkapan dan menghambat efisiensi operasional. Selain itu, sistem pelaporan masih dilakukan secara manual karena kurangnya perangkat seperti komputer. Dari hasil observasi dan perbandingan dengan standar regulasi, terlihat kesenjangan signifikan pada beberapa aspek seperti lantai pelelangan yang sebagian rusak, sistem pembuangan yang kurang higienis, fasilitas sanitasi yang terbatas, serta ketidakhadiran sistem pendingin dan cold storage. Kesenjangan terbesar ada pada fasilitas pendingin yang sama sekali tidak tersedia, padahal sangat krusial untuk menjaga mutu produk.

### 3. Anggaran

Pengelolaan anggaran TPI Arumbai bersumber dari dua utama, yaitu APBD Kota Ambon dan hasil penarikan retribusi pelelangan sebesar 3,5% dari total transaksi. Anggaran ini digunakan untuk operasional, pengembangan, dan pemeliharaan TPI. Namun, alokasi dana khusus untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas masih sangat terbatas. Usulan perbaikan dan pengadaan fasilitas penting seperti sistem pendingin saat ini masih dalam tahap perencanaan dan proses persetujuan karena keterbatasan dana. Pendapatan dari retribusi mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi belum optimal karena banyak transaksi yang dilakukan di luar sistem TPI, sehingga potensi pendapatan belum terserap maksimal. Data realisasi anggaran dan penerimaan retribusi selama 2021-2024 menunjukkan adanya peningkatan, namun masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan pengembangan dan ketersediaan anggaran yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya strategi komprehensif untuk meningkatkan efektivitas penarikan retribusi, memprioritaskan alokasi anggaran pada kebutuhan krusial, serta peningkatan alokasi dana dari APBD untuk menutupi kekurangan pembiayaan.

Selain masalah anggaran, pengelolaan TPI Arumbai juga menghadapi kendala pada sumber daya manusia dan infrastruktur. Personel yang terbatas dengan beban kerja yang besar, regenerasi juru lelang yang kurang profesional, serta minimnya pelatihan administrasi dan pengawasan menghambat efisiensi pengelolaan. Infrastruktur dan fasilitas yang belum memenuhi standar nasional, seperti sanitasi yang buruk, tidak adanya sistem pendingin, dan ruang pelelangan yang sempit dan bercampur dengan pasar, turut memperparah kondisi. Keterbatasan teknologi juga membuat proses administrasi masih dilakukan secara manual.

Secara keseluruhan, untuk mengoptimalkan pengelolaan TPI Arumbai, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan sumber daya manusia melalui rekrutmen dan pelatihan, perbaikan infrastruktur sesuai standar, serta pengelolaan anggaran yang lebih efektif dengan peningkatan pendapatan retribusi dan prioritas kebutuhan pengembangan. Tanpa langkah tersebut, TPI Arumbai akan terus mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai pusat pelelangan ikan yang efisien dan berkelanjutan.

#### 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi tata kelola TPI Arumbai di Kota Ambon masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Temuan ini sejalan dengan penelitian Buton (2023) yang mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan TPI di Kota Ambon belum optimal karena adanya kepentingan pribadi, kurangnya fasilitas pendukung, serta pengawasan yang kurang efektif. Kedua penelitian sama-sama menekankan perlunya peningkatan pengawasan dan fasilitas sebagai bagian penting dalam optimalisasi pengelolaan TPI agar dapat berfungsi secara efektif dan adil.

Selain itu, aspek infrastruktur dan fasilitas yang belum memenuhi standar juga menjadi masalah yang ditemukan dalam penelitian ini. Hal ini mendukung temuan Sugoro (2024) yang menyoroti pentingnya perencanaan fasilitas terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan teknis operasional TPI. Meskipun Sugoro lebih menekankan pada aspek desain dan arsitektur, keduanya sepakat bahwa fasilitas

yang memadai adalah syarat mutlak untuk menjaga kualitas produk dan meningkatkan efisiensi transaksi di TPI.

Dalam hal pengawasan dan tata kelola, penelitian Dewianti (2023) memberikan gambaran yang hampir sama bahwa pengawasan yang belum optimal menjadi hambatan utama dalam efektivitas pengelolaan TPI Arumbai. Pendekatan pengawasan yang dilakukan di TPI Arumbai memang sudah mencakup aspek preventif dan partisipatif, namun masih lemah dalam aspek korektif, yang juga menjadi sorotan Dewianti. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan perlu diperkuat dengan mekanisme yang lebih tegas dan berkelanjutan.

Penelitian Sinaga (2020) di Dumai dan Karimah et al. (2019) di Indramayu juga memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa TPI di beberapa daerah belum berjalan secara optimal, baik dari segi organisasi maupun efisiensi teknis. Kesamaan permasalahan seperti keterbatasan personel, kurangnya fasilitas, dan sistem pelelangan yang belum ideal menunjukkan bahwa isu tata kelola TPI merupakan tantangan yang umum dihadapi di berbagai wilayah. Ini membuka peluang untuk menerapkan solusi dan strategi yang telah teruji dari daerah lain ke dalam pengelolaan TPI Arumbai.

Terakhir, beberapa penelitian seperti Balqis et al. (2019) yang mengusulkan digitalisasi proses pelelangan dan Wati & Hafiludin (2023) tentang pentingnya menjaga kualitas ikan, memberikan alternatif solusi yang relevan dan inovatif untuk mengatasi kendala-kendala di TPI Arumbai. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sementara perhatian pada kualitas produk dapat menjaga kepercayaan pembeli dan daya saing pasar. Oleh karena itu, pengembangan teknologi dan peningkatan standar mutu merupakan aspek strategis yang perlu dipertimbangkan dalam upaya optimalisasi tata kelola TPI.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi tata kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Arumbai di Kota Ambon, dapat disimpulkan bahwa tata kelola TPI Arumbai belum optimal. Meskipun terdapat peningkatan dalam volume transaksi, keterlibatan masyarakat, dan koordinasi antar pemangku kepentingan, masih terdapat berbagai kendala seperti sistem pelelangan yang kurang transparan, keterbatasan infrastruktur, dan penerapan regulasi yang belum maksimal. Faktor penghambat utama meliputi kurangnya fasilitas yang memenuhi standar, seperti cold storage, sanitasi yang buruk, serta area pelelangan yang sempit. Selain itu, masalah sumber daya manusia yang terbatas dan dominasi juru lelang yang berusia lanjut juga menjadi hambatan signifikan. Regulasi yang ada tidak diimbangi dengan sanksi tegas, sehingga menyebabkan tingginya transaksi di luar TPI. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perikanan telah melakukan sejumlah upaya, antara lain revisi regulasi, sosialisasi aturan dengan pendekatan humanis, serta meningkatkan pengawasan dan pembinaan. Pemerintah juga merencanakan pengembangan infrastruktur dan penambahan tenaga kerja serta pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pengelola dan juru lelang. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam mengoptimalkan fasilitas dan operasional TPI Arumbai.

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain terbatasnya ruang lingkup yang hanya mencakup TPI Arumbai tanpa membandingkan dengan TPI lainnya yang mungkin memiliki pengelolaan yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini mengandalkan

data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung yang mungkin belum sepenuhnya menggambarkan dinamika secara keseluruhan, mengingat kondisi lapangan yang dinamis. Ke depan, arah penelitian dapat difokuskan pada perbandingan antara pengelolaan TPI Arumbai dengan TPI di daerah lain yang lebih sukses, serta penggunaan metode survei atau pendekatan kuantitatif untuk memperoleh data yang lebih representatif. Penelitian juga dapat mengkaji lebih mendalam tentang efektivitas implementasi kebijakan yang telah diterapkan serta dampaknya terhadap kesejahteraan nelayan dan efisiensi operasional TPI. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan TPI, seperti peran teknologi dan inovasi dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih dan apresiasi mendalam kepada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Arumbai dan Dinas Perikanan Kota Ambon yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan akses dalam pengumpulan data penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dan mendukung kelancaran serta keberhasilan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 6th Edition. Unpublished Thesis.
- Asraruddin, N. H., & Patiung, L. (2023). Pengembangan Masyarakat Maritim di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pulau Tomia. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 6(2), 235–240. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i2.31677>
- Balqis, A. N., Ramadhana, L., Wirawan, R., & Isnainiyah, I. N. (2019). Bid-Fish: An android application for online fish auction based on case study from Muara Angke, Indonesia. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 508(1), 012128. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/508/1/012128>
- Buton, R., Al Hamid, R., Virgo, H., & Pattimukay, R. (2023). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kota Ambon. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 649–668. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8324713>
- Creswell, J. W. (2020). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. In *Mycological Research*.
- Dawa, U. P. L., Awang, B. U. M. T. J., Gadi, D. S., & Lakapu, M. M. (2024). Identification and prevalence of *Anisakis* sp. parasites in tuna at the Oeba Fish Auction Site (FAS)—Kupang City [Identifikasi dan prevalensi parasit *Anisakis* sp. pada ikan tongkol di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Oeba-Kota Kupang]. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 27(10), 955–963. <https://doi.org/10.17844/jphpi.v27i10.54739>
- Dewianti, S., Rahawarin, M. A., & Ohoiwutun, S. K. (2023). Analisis Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Arumbai Oleh Dinas Perikanan Kota Ambon. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1). <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3739>
- Isma, S. E. (2022). Efektivitas dan Strategi Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bungku di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. *Efektivitas Dan Strategi Pengembangan Tempat Pelelangan*

Ikan (TPI) Bungku Di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Volume 1. <http://repository.umi.ac.id/id/eprint/2060>

Nurdin, I. & Hartati. (2019). Metodologi Penelitian Sosial.

Ridwan, R., & Tungka, N. F. (2024). Metode Penelitian (L. O. A. Dani, Ed.). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.

Simangunsong, F. (2017). Metode Penelitian Pemerintahan. Alfabeta.

Sinaga, L., Zulkarnaini, & Hendrik. (2020). Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Mendukung Usaha Kegiatan Nelayan Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, 1(4), 57–63. <https://sep.ejournal.unri.ac.id/index.php/jsep/article/view/64>

Sugoro, E., Topan, A., Syanjayanta, B., Santo Mita, M. W., Arsitektur, J., Teknik, F., & Musamus Ji Kamizaun Mopah Lama Merauke, U. (2024). Tempat Pelelangan Ikan Di Merauke (Pendekatan Arsitektur Post Modern). 6(2), 1–11. <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/archi>

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Siringoringo, H. (2005). Seri Teknik Riset Operasional. In Graha Ilmu.

Wati, S. M., & Hafiludin. (2023). Analysis of the quality of Japanese threadfin bream and red bigeye fish caught by fisherman at the Mayangan Fish Auction, Probolinggo [Analisis mutu ikan kurisi dan swanggi hasil tangkapan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Mayangan, Probolinggo]. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 26(1), 25–38. <https://doi.org/10.17844/jphpi.v26i1.42366>

Wiraditama, A. P., Handayani, M., & Putri, A. S. (2024). Assessment Mutu Ikan Tongkol Di Tempat Pelelangan Ikan Gudang Lelang, Kota Bandar Lampung. *Jurnal Marshela (Marine and Fisheries Tropical Applied Journal)*, 2(1), 41-49. <https://doi.org/10.25181/marshela.v2i1.3443>

